

Legitimasi Kebijakan Pendidikan sebagai Kunci Keberhasilan Implementasi: Konsep, Proses, dan Problematika

^{*1}Jilan Nafia, ²Zakiatul Maghfiroh, ³Khadijah Saleh Al-Hamid,

⁴Sarah Alfinabillah, ⁵Muhammad Kahfi Al-Farisi

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

email: ^{*1}jilannafia2@gmail.com

Abstract

Literature review shows that legitimacy is an important factor in the success of education policy implementation because it determines the level of public acceptance, support, and participation toward established policies. However, various education policies still face challenges such as resistance from certain groups, differences in interests, and ineffective communication between policymakers and the public. This study aims to analyze the concept of education policy legitimacy, its importance, the legitimacy process, and various problems that arise in its implementation. The study uses a library research method by reviewing relevant books, scientific journals, and documents. Data were analyzed descriptively and qualitatively through the processes of data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. The results show that legitimacy functions to provide validity to policies, increase public participation, reduce potential conflicts, and support the sustainability of education policy implementation. The legitimacy process is carried out through public consultation, obtaining community support, involving community leaders, deliberation, and policy refinement before formal approval. This study concludes that effective communication, transparency, and active public participation are the main factors in realizing strong legitimacy of education policy so that policy implementation can run more effectively and sustainably.

Keywords: *Education Policy Legitimacy, Policy Implementation, Public Participation, Policy Communication, Public Support*

Abstrak

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa legitimasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan karena menentukan tingkat penerimaan, dukungan, dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan. Namun, berbagai kebijakan pendidikan masih menghadapi tantangan berupa penolakan dari kelompok tertentu, perbedaan kepentingan, serta kurang efektifnya komunikasi antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep legitimasi kebijakan pendidikan, pentingnya legitimasi, proses legitimasi, serta berbagai permasalahan yang muncul dalam implementasinya. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses pengumpulan, reduksi,

penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi berfungsi memberikan keabsahan terhadap kebijakan, meningkatkan partisipasi masyarakat, mengurangi potensi konflik, dan mendukung keberlanjutan implementasi kebijakan pendidikan. Proses legitimasi dilakukan melalui konsultasi publik, perolehan dukungan masyarakat, pelibatan tokoh masyarakat, musyawarah, dan penyempurnaan kebijakan sebelum disahkan. Kajian ini menyimpulkan bahwa komunikasi yang efektif, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor utama dalam mewujudkan legitimasi kebijakan pendidikan yang kuat sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Legitimasi Kebijakan Pendidikan, Implementasi Kebijakan, Partisipasi Masyarakat, Komunikasi Kebijakan, Dukungan Publik*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan sehingga mampu berkontribusi terhadap kemajuan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana dalam mengembangkan potensi peserta didik (Nurhakim et al., 2025). Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, serta penanaman nilai-nilai yang mendukung kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik serta berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa (Wardani et al., 2022). Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan memerlukan arah dan pedoman yang jelas agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah sebagai pemegang otoritas memiliki kewenangan dalam merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan pendidikan. Kebijakan merupakan kehendak yang bersifat umum dan menjadi penentu arah dalam penyusunan suatu program (Darsyah, & Chanifudin, 2020). Kebijakan pendidikan menjadi instrumen penting yang digunakan untuk mengatur, mengarahkan, dan mengembangkan sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Kebijakan pendidikan sebagai kunci dalam mencapai keunggulan, bahkan eksistensi bagi berbagai negara dalam persaingan global sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapat perhatian khusus (Arifin et al., 2024). Berbagai kebijakan yang dapat diterapkan, seperti perubahan kurikulum, sistem evaluasi pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, digitalisasi

pendidikan, hingga peningkatan kompetensi tenaga pendidik, merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Melalui kebijakan yang tepat, pemerintah dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap tantangan global.

Namun demikian, keberhasilan suatu kebijakan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya. Banyak kebijakan yang secara substansi dianggap baik, tetapi mengalami kendala ketika diterapkan di lapangan. Salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah legitimasi. Legitimasi merupakan bentuk pengakuan, penerimaan, dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Dalam konteks pendidikan, legitimasi menjadi aspek penting karena kebijakan yang diterapkan akan berdampak langsung pada berbagai pihak, seperti peserta didik, guru, kepala sekolah, orang tua, lembaga pendidikan, serta masyarakat secara luas (Roihanah et al., 2022).

Legitimasi memberikan dasar hukum sekaligus dasar sosial bagi pelaksanaan suatu kebijakan. Kebijakan yang memiliki legitimasi kuat cenderung lebih mudah diterima dan dilaksanakan karena memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Sebaliknya, kebijakan yang tidak memperoleh legitimasi yang memadai sering kali menghadapi berbagai bentuk resistensi, baik dalam bentuk kritik, penolakan, maupun rendahnya tingkat kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi yang dimiliki pemerintah, tetapi juga pada tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan. Selain itu, implementasi kebijakan yang efektif juga hanya dapat tercapai apabila informasi kebijakan dikomunikasikan secara jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat (Nani, 2021).

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kebijakan pendidikan di Indonesia menunjukkan pentingnya legitimasi dalam proses implementasi kebijakan. Perubahan kurikulum, penerapan sistem pembelajaran berbasis teknologi, kebijakan asesmen nasional, hingga berbagai program transformasi pendidikan sering kali menimbulkan beragam respons dari masyarakat. Sebagian kelompok mendukung kebijakan tersebut karena dianggap mampu meningkatkan kualitas pendidikan, sementara kelompok lain menunjukkan sikap kritis karena merasa kurang dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa proses legitimasi menjadi tahapan penting yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Permasalahan legitimasi kebijakan pendidikan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah adanya penolakan dari kelompok tertentu yang memiliki kepentingan berbeda dengan tujuan kebijakan yang dirumuskan. Selain

itu, kurangnya komunikasi sering menjadi penyebab munculnya kesalahpahaman dan penolakan masyarakat terhadap kebijakan pendidikan (Herman & Mahyuddin, 2020). Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan juga dapat menimbulkan anggapan bahwa kebijakan hanya merupakan keputusan sepihak pemerintah tanpa mempertimbangkan kebutuhan pihak yang terdampak. Maka, jika dalam implementasi saja terdapat kesenjangan, maka tujuan kebijakan tidak akan tercapai (Fadilah et al., 2025). Akibatnya, kebijakan yang seharusnya menjadi solusi terhadap permasalahan pendidikan justru menghadapi hambatan dalam implementasinya.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas pentingnya legitimasi dan komunikasi dalam kebijakan pendidikan. Menurut (Darlina et al., 2025) hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi berperan dalam meningkatkan dukungan masyarakat, memperkuat kepercayaan publik, serta meminimalkan konflik yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Selain itu, komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan dan masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun pemahaman bersama mengenai tujuan kebijakan pendidikan. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih membahas legitimasi dari sudut pandang tertentu, seperti komunikasi kebijakan atau partisipasi masyarakat, sehingga diperlukan kajian yang lebih komprehensif mengenai legitimasi kebijakan pendidikan secara menyeluruh.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai legitimasi kebijakan pendidikan menjadi penting untuk dilakukan. Pemahaman yang komprehensif mengenai konsep legitimasi, urgensi legitimasi, proses legitimasi, serta berbagai permasalahan yang muncul dalam proses tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Selain itu, kajian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan yang lebih partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi dalam kebijakan pendidikan dengan fokus pada pengertian legitimasi kebijakan pendidikan, pentingnya legitimasi dalam mendukung implementasi kebijakan, proses legitimasi yang dilakukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, serta berbagai problem yang muncul dalam proses legitimasi tersebut. Melalui kajian ini diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran legitimasi sebagai salah satu faktor penting dalam mewujudkan kebijakan pendidikan yang efektif, berkelanjutan, dan mampu mencapai tujuan pendidikan nasional.

METODE

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan literature review dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research) untuk mengkaji legitimasi kebijakan pendidikan. Literatur yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, dan dokumen akademik yang relevan dengan tema legitimasi kebijakan pendidikan. Fokus kajian diarahkan pada konsep legitimasi, urgensi legitimasi, proses legitimasi, serta berbagai problem yang muncul dalam implementasi kebijakan pendidikan. Kriteria inklusi mencakup sumber yang membahas legitimasi dan komunikasi kebijakan pendidikan serta tersedia dalam bentuk publikasi ilmiah yang dapat diakses secara lengkap.

Strategi pencarian literatur dilakukan melalui berbagai basis data akademik dan sumber ilmiah daring. Kata kunci yang digunakan antara lain legitimasi kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan, komunikasi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan dukungan publik. Hasil pencarian kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian topik, kualitas metodologi, serta relevansinya dengan tujuan penelitian. Literatur yang bersifat umum, tidak relevan, atau tidak membahas legitimasi kebijakan pendidikan secara langsung tidak dimasukkan dalam kajian.

Analisis literatur dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai pandangan yang ditemukan dalam sumber-sumber yang telah dipilih. Temuan-temuan tersebut kemudian dikategorikan ke dalam beberapa tema utama, yaitu konsep legitimasi kebijakan pendidikan, pentingnya legitimasi, proses legitimasi, dan problem legitimasi dalam implementasi kebijakan pendidikan. Sintesis literatur dilakukan secara naratif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran legitimasi dalam mendukung keberhasilan kebijakan pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan penulis menyusun gambaran yang utuh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan dan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil sintesis terhadap berbagai literatur menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan pendidikan merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan dalam sistem pendidikan. Berbagai penelitian menjelaskan bahwa kebijakan yang memperoleh legitimasi yang kuat cenderung lebih mudah diterima dan dilaksanakan karena mendapatkan pengakuan, kepercayaan, serta dukungan dari masyarakat. Sebaliknya, kebijakan yang kurang memiliki legitimasi sering menghadapi berbagai hambatan berupa penolakan, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kesulitan dalam proses implementasi. Temuan-temuan tersebut

memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya bergantung pada kualitas perumusannya, tetapi juga pada tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan. Oleh karena itu, pembahasan dalam artikel ini difokuskan pada konsep legitimasi kebijakan pendidikan, pentingnya legitimasi dalam implementasi kebijakan, proses legitimasi yang dilakukan sebelum kebijakan diterapkan, serta berbagai permasalahan yang muncul dalam upaya memperoleh legitimasi kebijakan pendidikan.

A. Pengertian Legitimasi dalam Kebijakan Pendidikan

Secara etimologis legitimasi berasal dari bahasa Latin *Lex* yang mengandung arti hukum. Kata legitimasi tidak dapat dipisahkan dari kata-kata seperti keaslian, kehalalan dan kenyataan. Jadi kenyataan yang jelas adalah menunjukkan keserupaan dengan hukum yang berlaku, atau aturan yang ada, apakah aturan formal yang sah, baik, standar atau sosial sudah cukup lama ditetapkan secara sah atau tidak.

Secara umum, legitimasi juga dapat dimaknai sebagai pemberian wewenang kepada pihak tertentu untuk membuat serta melaksanakan keputusan sebagai bentuk pengesahan dari masyarakat. Legitimasi dalam kebijakan pendidikan merupakan proses pemberian pengesahan atau pengakuan terhadap suatu kebijakan agar memiliki kekuatan hukum dan dapat dilaksanakan dalam sistem pendidikan. Legitimasi berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap kewenangan pihak yang membuat dan menetapkan kebijakan tersebut. Suatu kebijakan pendidikan dapat dikatakan memiliki legitimasi apabila kebijakan tersebut telah memperoleh pengakuan, persetujuan, serta dukungan dari masyarakat maupun lembaga yang berwenang untuk menetapkannya. (Kumala et al., 2021)

Dalam konteks kebijakan pendidikan, legitimasi sangat penting karena kebijakan yang dibuat akan berdampak luas terhadap berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, guru, peserta didik, dan masyarakat. Oleh karena itu, sebelum kebijakan pendidikan diterapkan secara luas, diperlukan proses legitimasi agar kebijakan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas serta mendapat dukungan dari masyarakat.

Selain itu, legitimasi juga berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang dirumuskan dapat diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan konflik atau penolakan dalam pelaksanaannya. Kebijakan pendidikan yang tidak memiliki legitimasi yang kuat seringkali menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya dukungan dari masyarakat, kesulitan dalam implementasi, serta munculnya kritik terhadap kebijakan tersebut. Dengan adanya legitimasi, kebijakan pendidikan akan memiliki kekuatan yang lebih kuat untuk

dijalankan karena telah melalui proses pengakuan dan pengesahan oleh pihak yang berwenang. (Roihanah, et al., 2022)

Dengan demikian, legitimasi memiliki peran yang sangat penting dalam kebijakan pendidikan karena menentukan apakah suatu kebijakan dapat diterima dan dijalankan secara efektif dalam masyarakat. Proses legitimasi memberikan dasar hukum sekaligus dukungan sosial terhadap kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Melalui legitimasi, kebijakan pendidikan tidak hanya memiliki kekuatan untuk diberlakukan, tetapi juga memperoleh kepercayaan dari masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Oleh karena itu, keberadaan legitimasi menjadi salah satu unsur penting yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

B. Pentingnya Legitimasi Kebijakan Pendidikan

Legitimasi kebijakan pendidikan memiliki peran yang sangat penting karena ia menjadi dasar pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang dirumuskan. Tanpa legitimasi, kebijakan yang sudah dibuat berisiko ditolak atau tidak dijalankan dengan baik. Beberapa alasan pentingnya legitimasi kebijakan pendidikan yaitu (Kholifah et al., 2022):

1. Memberikan Otoritas dan Keabsahan

Legitimasi berfungsi sebagai pengesahan bahwa kebijakan pendidikan memiliki dasar hukum dan moral yang sah. Ia memastikan bahwa kebijakan bukan sekadar keputusan administratif, melainkan aturan yang diakui oleh masyarakat dan lembaga terkait. Dengan legitimasi, kebijakan memperoleh otoritas untuk dijalankan secara resmi dan konsisten. (Herwani, H. 2025)

2. Menumbuhkan Dukungan Masyarakat.

Kebijakan pendidikan tidak bisa berjalan tanpa adanya keterlibatan masyarakat. Legitimasi menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat. Kebijakan baru dianggap berlaku setelah mendapat persetujuan publik. Dukungan ini penting agar kebijakan tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Menghindari Konflik dan Penolakan

Jika kebijakan diterapkan tanpa legitimasi, besar kemungkinan muncul penolakan dari masyarakat atau kelompok tertentu. Penolakan ini bisa menghambat implementasi dan menimbulkan konflik. Oleh karena itu, legitimasi menjadi mekanisme untuk meminimalisir resistensi dan memastikan kebijakan diterima secara luas.

4. Menjadi Landasan Evaluasi dan Keberlanjutan

Legitimasi juga berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan kebijakan. Dengan

adanya pengakuan masyarakat, kebijakan dapat dievaluasi secara lebih objektif. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memperbaiki atau menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan pendidikan yang terus berkembang.

5. Menjamin Konsistensi dengan Nilai dan Konstitusi

Dalam konteks Indonesia, legitimasi kebijakan pendidikan harus sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundangan lainnya. Hal ini memastikan bahwa kebijakan tidak bertentangan dengan nilai dasar bangsa dan tetap sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.

C. Proses Legitimasi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan yang sudah dibuat atau dirumuskan harus disahkan atau dilegitimasi terlebih dahulu sebelum diterapkan kepada masyarakat luas. Legitimasi ini sangat penting karena dapat membawa dampak yang positif maupun negatif (Kumala et al, 2021). Dengan legitimasi, pemimpin dapat membawa pada stabilitas politik, memfasilitasi perubahan sosial, memperluas ranah kesejahteraan yang dilakukan pemerintah, dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, proses legitimasi diperlukan agar kebijakan yang ditetapkan memperoleh dukungan serta dapat diterima oleh masyarakat dengan baik.

Legitimasi adalah keputusan yang dibuat oleh pemimpin atau pejabat pemerintah berdasarkan nilai-nilai publik, standar politik, dan etika yang berlaku. Dengan demikian, kebijakan tersebut bisa memperoleh penerimaan dan dukungan dari masyarakat serta pihak yang terkait. Legitimasi itu tidak hanya bergantung kepada proses pengambilan keputusan saja, tetapi juga pada seberapa besar kebijakan yang diambil tersebut bisa memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Herwani. 2025). Dalam proses legitimasi, semua hal harus dipertimbangan dengan matang karena legitimasi itu tidak bisa sembarangan diberikan. Kebijakan yang tidak memperoleh legitimasi yang memadai sering menghadapi resistensi berupa kritik, penolakan, maupun rendahnya tingkat kepatuhan terhadap kebijakan tersebut (Setiawan et al., 2021). Oleh karena itu setiap pengambilan keputusan harus memiliki kejelasan dan dasar yang kuat. Proses legitimasi kebijakan harus melibatkan dialog yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan proses tersebut, legitimasi kebijakan pendidikan dilakukan melalui beberapa tahapan yang bertujuan untuk memperoleh dukungan dan penerimaan dari masyarakat sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan (Madjid, 2018).

1. Meminta pendapat masyarakat

Kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah atau perumus kebijakan terlebih dahulu dimintakan pendapat kepada masyarakat sebelum diterapkan. Hal

ini dilakukan agar masyarakat mengetahui dan memberikan tanggapan terhadap kebijakan tersebut. Dengan cara ini, kebijakan diharapkan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Memperoleh dukungan dari masyarakat

Dalam proses legitimasi, masyarakat diminta memberikan dukungan terhadap kebijakan yang telah dirumuskan. Dukungan masyarakat penting agar kebijakan dapat diterima dan tidak menimbulkan penolakan ketika dilaksanakan.

3. Melibatkan tokoh nonformal atau tokoh kunci masyarakat

Perumus kebijakan terkadang tidak langsung meminta dukungan kepada seluruh masyarakat, tetapi melalui tokoh nonformal atau tokoh kunci yang ada di masyarakat. Tokoh ini biasanya berasal dari berbagai bidang seperti agama, profesi, budaya, ekonomi, dan lainnya. Mereka dipilih karena memiliki pengaruh dan juga dipercaya oleh masyarakat.

4. Tokoh masyarakat membantu menghimpun dukungan rakyat

Tokoh masyarakat yang dilibatkan akan menyampaikan kebijakan tersebut kepada masyarakat luas. Mereka kemudian mengajak dan memengaruhi masyarakat untuk mendukung kebijakan tersebut karena masyarakat biasanya memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada tokoh-tokoh tersebut.

5. Pengambilan keputusan melalui musyawarah atau voting

Dalam proses legitimasi biasanya dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah bisa dilakukan oleh para wakil rakyat agar bisa mencapai mufakat tanpa adanya kelompok mayoritas atau minoritas. Jika mufakat tidak tercapai, maka voting atau suara terbanyak digunakan sebagai jalan terakhir.

6. Penyempurnaan kebijakan sebelum disahkan

Proses legitimasi sendiri bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan yang telah dirumuskan. Masukan dari masyarakat bisa dijadikan bahan revisi atau perbaikan dalam kebijakan yang telah dirumuskan tersebut. Hasil akhirnya setelah proses ini adalah kebijakan yang sudah sah dan siap untuk dilaksanakan.

Dengan demikian, proses legitimasi kebijakan pendidikan merupakan tahapan penting yang harus dilakukan agar kebijakan yang dirumuskan memperoleh dukungan masyarakat, memiliki dasar yang kuat, serta dapat dilaksanakan secara efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, legitimasi juga membantu menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Melalui proses legitimasi yang baik, kebijakan pendidikan diharapkan dapat berjalan secara optimal serta memberikan manfaat yang nyata bagi perkembangan dunia pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

D. Problem Legitimasi Kebijakan Pendidikan

Legitimasi kebijakan pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan. Legitimasi dapat diartikan sebagai penerimaan dan dukungan dari masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau pihak yang berwenang. Jika suatu kebijakan pendidikan memiliki legitimasi yang baik, maka kebijakan tersebut akan lebih mudah diterapkan karena mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah, tenaga pendidik, peserta didik, serta masyarakat.

Namun dalam praktiknya, proses legitimasi kebijakan pendidikan sering menghadapi berbagai kendala. Permasalahan tersebut dapat muncul dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembuatan maupun pelaksanaan kebijakan. Terdapat beberapa problematika yang sering terjadi dalam proses legitimasi kebijakan pendidikan (Hapsari et al, 2022) :

1. Adanya penolakan dari pelaksana rencana sebelumnya yang sudah tidak ada lagi. Ada perlawanan dari eks aktor kebijakan yang bukan lagi aktor. Akibatnya, para eks aktor kebijakan masih cenderung menganggap apa yang dirumuskan dan dilaksanakan dapat bertahan sampai saat ini.
2. Ada kebijakan yang baru dikembangkan melawan oposisi dari kelompok konservatif. Hal ini terjadi ketika kebijakan yang dirumuskan berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang dianggap tradisional. Secara umum, sangat sulit untuk mengubah sesuatu yang tradisional. Butuh waktu lama untuk mengubah masyarakat yang konservatif.
3. Akibat dari oposisi dari kelompok konservatif dan mantan aktor politik yang bukan lagi aktor, para pengikut ini biasanya cenderung mengikuti gerak-gerik dan tata cara pemimpinnya. Maka dari itu, proses legitimasi terhambat.
4. Ada berbagai formulasi dari kelompok yang memiliki visi, pengakuan, kepentingan perumus dan legitimasi. Kelompok resistensi umumnya sulit untuk dikompromikan. Jika mereka tidak dikonfirmasi, legitimasi perlu mendekati kelompok tersebut sehingga mereka dapat bersama untuk mendukung kebijakan yang direncanakan.
5. Pengambil keputusan kebijakan pendidikan kekurangan pengetahuan, informasi, dan isu pendidikan, baik secara konseptual maupun kontentis. Pada masa pemerintahan orde baru, banyak kebijakan yang tidak dirumuskan melalui proses yang adil seperti biasanya. Perkembangan kebijakan tidak melalui proses akumulasi, sirkulasi, dan adaptasi yang normal. Perumusan kebijakan publik yang dilakukan dengan cara yang tidak melalui proses politik rasional yang biasa akan menghadapi persoalan legitimasi. Isu legitimasi terletak pada penolakan publik terhadap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah, dan akibatnya keputusan kebijakan tidak mendapat dukungan

(ilegal).

Dari berbagai problematika yang muncul dalam proses legitimasi kebijakan pendidikan menunjukkan bahwa perumusan dan pelaksanaan kebijakan tidak hanya bergantung pada keputusan pemerintah saja. Dukungan dari masyarakat, lembaga pendidikan, tenaga pendidik, serta berbagai pihak lain sangat diperlukan agar kebijakan yang dibuat dapat berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diperlukan berbagai strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan legitimasi kebijakan pendidikan.

Upaya penyelesaian ini penting dilakukan agar kebijakan pendidikan tidak hanya menjadi keputusan formal dari pemerintah, tetapi juga dapat diterima, dipahami, dan didukung oleh masyarakat. Dengan adanya strategi yang tepat, diharapkan kebijakan pendidikan dapat dilaksanakan secara lebih efektif serta mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan. Berikut ini yang dapat dijadikan solusi diantaranya adalah:

1. Adanya keterbukaan ruang publik sebagai sarana diskusi terbuka. Hal ini membantu mempermudah dalam menyiapkan sarana diskusi dengan masyarakat untuk mengkomunikasikan kebijakan baru dari pembuat kebijakan, dengan begitu masyarakat umum akan memiliki cara untuk memahaminya secara lebih detail.
2. Adanya komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dan masyarakat umum. Ada komunikasi antara dua pihak ini antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Setelah komunikasi dua arah, serta komunikasi satu arah terjalin, masyarakat dan pembuat kebijakan dapat saling memahami kondisi keduanya.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Masyarakat menjadi sadar bisa ikut aktif bukannya pasif dengan perumusan kebijakan yang ada sehingga mereka tidak merasa bahwa setelah kebijakan itu ada mereka baru menyesali karena tidak berkontribusi dalam perumusan kebijakan.
4. Perlunya media komunikasi dalam penyebaran informasi Pendidikan. Hadirnya informasi edukasi yang mudah diakses masyarakat di seluruh wilayah, sehingga tidak hanya berita hoax yang berdampak pada kebijakan baru, tetapi juga bagaimana pembuat kebijakan menciptakan pembuat kebijakan yang baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa legitimasi kebijakan pendidikan merupakan proses pemberian pengesahan dan pengakuan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pihak yang berwenang agar kebijakan tersebut memiliki kekuatan hukum serta dapat diterima oleh masyarakat.

Legitimasi menjadi unsur penting dalam kebijakan pendidikan karena menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut dalam sistem pendidikan.

Legitimasi kebijakan pendidikan memiliki peran yang sangat penting, di antaranya memberikan keabsahan terhadap kebijakan, menumbuhkan dukungan masyarakat, menghindari konflik atau penolakan, serta menjadi landasan dalam evaluasi dan keberlanjutan kebijakan pendidikan. Dengan adanya legitimasi, kebijakan pendidikan tidak hanya menjadi keputusan formal pemerintah, tetapi juga memperoleh dukungan dari masyarakat sehingga lebih mudah untuk dilaksanakan.

Proses legitimasi kebijakan pendidikan dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti meminta pendapat masyarakat, memperoleh dukungan publik, melibatkan tokoh masyarakat, melakukan musyawarah atau voting, serta menyempurnakan kebijakan sebelum disahkan. Proses ini bertujuan agar kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diterapkan secara efektif.

Namun, dalam pelaksanaannya proses legitimasi kebijakan pendidikan juga menghadapi berbagai permasalahan, seperti adanya penolakan dari kelompok tertentu, perbedaan kepentingan antar pihak, serta kurangnya informasi dan komunikasi antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang baik, keterbukaan ruang diskusi, serta partisipasi masyarakat agar legitimasi kebijakan pendidikan dapat tercapai dengan baik dan kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan dunia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, N. R., Yulisma, L., Setiadi, T., Muchtar, H. S., & Koswara, N. (2024). Konsep dasar kebijakan pendidikan dan kinerja birokrasi (KPKB). *Jurnal Wahana Pendidikan*, 11(2), 329–346. <http://dx.doi.org/10.25157/jwp.v11i2.11141>
- Darlina, N., Prianti, N., Marsidin, S., & Irsyad. (2025). Pengaruh partisipasi stakeholder terhadap kualitas keputusan kebijakan sekolah. *JKPS: Jurnal Kepemimpinan & Pengurusan Sekolah*, 10(4), 2203–2213 . <https://doi.org/10.34125/jkps.v10i4.1154>
- Darsyah, S., & Chanifudin. (2020). Kebijakan dalam pendidikan. *At-Thullab: Jurnal of Islamic Studies*, 1(1), 116–133.
- Fadilah, F. Z., Rizanah, S., Naga, F. Y., Prayogi, G., Azizah, S. N., & Nasor, M. (2025). Analisis kebijakan dalam pendidikan. *UNISAN JURNAL: Jurnal Manajemen dan Pendidikan*, 4(8), 108–119.
- Hapsari, Aprilia Putri, Farid Setiawan, Santi Mahmuda Urbaningkrum, Umi Rahmawati, Mutiara Nur Afifah, and Faniya Nurul Rohmah. "Analisis Urgensi Proses Legitimasi dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia." *Sultra Educational Journal* 2, no. 2 (2022): 67–77.

- <https://doi.org/10.54297/seduj.v2i2.247>.
- Herman, H., & Mahyuddin, A. A. (2020). Komunikasi kebijakan zonasi pendidikan di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 143-156.
- Herwani, H. (2025). Perumusan Dalam Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. *JIP: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 107-122.
- Kholifah, Nisa Amalia, Farid Setiawan, Nurullita Almunawaroh, et al. "Urgensi Legitimasi Dan Komunikasi Dalam Menyusun Kebijakan Pendidikan." *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan* 4, no. 2 (2022): 99-115. <https://doi.org/10.46773/muaddib.v4i2.347>.
- Kumala, Nur'aini Dewi, Farid Setiawan, Rahmadin Munauwarah, Eni Wulandari, and Tramidzi Tramidzi. "Legitimasi dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan* 6, no. 2 (2021): 12-19. <https://doi.org/10.47435/jpdk.v6i2.625>.
- Madjid, A. 2018. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Nani, Y. N. (2021). Peran komunikasi dalam implementasi kebijakan perluasan akses pendidikan secara merata (Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo). *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 7(3), 231-240. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.463>
- Nurhakim, H. Q., Hakim, A. R., Basuki, Rahmat, M., Supiana, & Zakiah, Q. Y. (2025). Perumusan, formulasi, dan adopsi kebijakan pendidikan. *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 7(4). <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/Muaddib>
- Roihanah, R., Setiawan, F., Setianto, E., & Istinganah, I. (2022). Legitimasi dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Education and Development*, 10(3), 94-99.
- Setiawan, F., Munauwarah, R., Wulandari, E., Dewi, N. A., & Tramidzi. (2021). Legitimasi dan komunikasi kebijakan pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 6(2), 12-19. <https://doi.org/10.47435/jpdk.v6i2.625>
- Wardani, A. R., Setiawan, F., Rifki, M., Nazhif Nafi' Dinulloh, I. A. Maulana, N. A. Zahro, H. A. Rizkilla, & N. Khiyaroh. (2022). Konsep dasar analisis kebijakan pendidikan. *Jurnal Education and Development*, 10(3), 88-93.